



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.P/2023/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Tajerianto**, Tempat lahir Sorowako, tanggal 29 januari 1992, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan jambu no 20 desa langkea raya Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Anak Masuk Dalam Daftar Gaji, sebagai berikut :

- 1) Bahwa istri pemohon mengajukan yaitu ANDI MEGHASATRI DWIANSMAWANTY Sebelumnya telah menikah dengan SYAMSUL BACHRI HAERUDDIN dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu:  
-ALMEVIRA MUSTIKA KEZYA DASYA, Lahir di Makassar 09 mei 2007;  
-MUHAMMAD IYAD ALFARUQ Lahir di Makassar 20 april 2010  
-MUHAMMAD HAFIDZ ALFURQON Lahir di Makassar 02 february 2012
- 2) Bahwa SYAMSUL BACHRI HAERUDDIN yang merupakan suami pertama dari istri pemohon telah bercerai hidup melalui pengadilan Agama sungguminahasa pada tanggal 13 january 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1436 H sesuai akte cerai nomor 725/Pdt.G/2014/PA.sgm
- 3) Bahwa istri pemohon yaitu ANDI MEGHASATRI DWIANSMAWANTI Sebelumnya telah menikah untuk yang ke 2 (dua) kalinya dengan ASWAR ASHARI dan di karuniai seoran anak yaitu;  
-ZULAYKHA AS SYAHIDAH, Lahir di makassar 12 july 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa aswar ashari yang merupakan suami kedua dari istri Pemohon telah bercerai hidup melalui Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 12 jumadil awwal 1443 H. sesuai dengan Akta cerai nomor 2361/Pdt.G/2021/PA.Mks
- 5) Bahwa sejak pemohon dengan ANDI MEGHASATRI DWIANSMAWANTY Menikah , setelah itu pula semua anak ANDI MEGHASATRI DWIANSMAWANTY Dengan suami saat ini yaitu TAJERianto , Berada dalam pemeliharaan pemohon dengan ANDI MEGHASATRY DWIANSMAWANTY
- 6) Bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada istri dan anaknya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab serta memperlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
- 7) Bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, Pemohon berkeinginan pula untuk memasukkan MUHAMMAD HAFIDZ ALFURQON Dan ZULAYKHA AS SYAHIDAH, Ke dalam daftar tunjangan Pemohon di tempat Pemohon Bekerja;
- 8) Bahwa pada saat mengajukan permohonan untuk memasukkan anak tersebut ke dalam daftar tunjangan pemohon di tempat pemohon bekerja, *pemohon di haruskan melampirkan penetapan dari pengadilan yang menyatakan bahwa MUHAMMAD HAFIDZ ALFURQON Dan ZULAYKHA AS SYAHIDAH berada dalam tanggungan pemohon;*
- 9) Bahwa oleh karena adanya persyaratan dari perusahaan tempat pemohon bekerja dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri malili yang menyatakan bahwa, MUHAMMAD HAFIDZ ALFURQON Dan ZULAYKHA AS SYAHIDAH berada dalam tanggungan Pemohon

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Menyatakan anak yang bernama MUHAMMAD HAFIDZ ALFURQON Dan ZULAYKHA AS SYAHIDAH adalah anak yang terlahir dari perkawinan sebelumnya;
3. Menyatakan bahwa ANDI MEGHASATRI DWIANSMAWANTY telah melangsungkan perkawinan kembali dengan TAJERianto (PEMOHON) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor' 0047/002/III/2022 tanggal 04 maret 2022 bertepatan 30 rajab 1443 H;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan akibat dari perkawinan tersebut anak yang lahir dari perkawinan ANDI MEGHASATRI DWI ANSMAWANTY Dengan suami sebelumnya, juga terikat hubungan perkawinan/ keluarga dengan pemohon dan berhak mendapatkan perlindungan layaknya seperti anak dari pemohon;
5. Menyatakan Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yaitu ANDI MEGHASATRI DWIANSMAWANTY Dan anak dari istrinya tersebut yaitu MUHAMMAD HAFIDZ ALFURQON Dan ZULAYKHA AS SYAHIDAH, dan memasukkan ke dalam daftar gaji/tanggungan pemohon di tempat pemohon bekerja;
6. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini di tanggung sepenuhnya oleh pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri dan setelah membacakan permohonannya tertanggal 20 Mei 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Kuasa Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain :

1. Fotocopy Surat Keterangan No: RL021/HR/I/2023, tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Payslip bulan April 2023, atas nama Tajerianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, dengan nomor 0047/002/111/2022, atas nama Tajerianto dengan Andi Meghasatri Dwi Ansmawanti, tertanggal 04 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, dengan nomor 7371-LU-12072012-0223, atas nama Muhammad Hafidz Al Furqon, tertanggal 12 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Kartu Keluarga, dengan nomor 7324030707140001, atas nama kepala keluarga Tajerianto, tertanggal 02 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 7324-LT-02032023-0020, atas nama Zulaykha As Syahidah, tertanggal 2 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Cerai, nomor 41/AC/2025/Sgm, atas nama A. Meghasatri Dwi Sp. Binti Sugianto dengan Syamsul Bahri bin H. Haeruddin tertanggal 13 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Akta Cerai, nomor 2271/AC/2021/PA.Mks, atas nama Andi Meghasatri Dwiansmawanty dengan Aswar Ashari bin Syahrir Hamdy, tertanggal 17 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Nama Pegawai, atas nama Tajerianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Tajerianto, dengan Nomor Induk Kependudukan 7317072901920001, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Andi Meghasatri Dwiansmawanti, dengan Nomor Induk Kependudukan 7371115108870005, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali terhadap bukti P-7, P-8 dan P-9 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Anna Safitri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permohonan pemohon untuk untuk memasukan Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah ke dalam Tanggungan Gaji Pemohon;
  - Bahwa Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah merupakan anak dari istri Pemohon dan mantan suaminya;
  - Bahwa Muhammad Hafidz Alfurqon adalah anak dari Andi Meghasatri Dwiansmawanty dengan suami pertamanya yakni Syamsul Bachri Haeruddin sedangkan Zulaykha As Syahidah adalah anak dari Andi Meghasatri Dwiansmawanty dengan suami keduanya Aswar Ashari;
  - Bahwa Andi Meghasatri Dwiansmawanty bercerai dengan Syamsul Bachri Haeruddin pada tanggal 13 januari 2015 sedangkan pada perkawinan kedua Andi Meghasatri Dwiansmawanty dengan Aswar Ashari juga telah putus karena perceraian;
  - Bahwa saat ini Andi Meghasatri Dwiansmawanty telah menikah dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon, anak-anak Andi Meghasatri Dwiansmawanty dengan suami sebelumnya, tinggal dan dinafkahi oleh Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung dari anak-anak Andi Meghasatri Dwiansmawanty tidak memberikan nafkah semenjak Andi Meghasatri Dwiansmawanty menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa alasan kenapa Pemohon ingin memasukkan Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah kedalam daftar gajinya dikarenakan saat ini Muhammad Hafidz Alfurqon sedang menderita penyakit kelainan pada alat kelaminnya sehingga membutuhkan biaya perawatan di rumah sakit sedangkan Zulaykha As Syahidah yang masih balita juga sering sakit-sakitan sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit, maka dengan dimasukkan ke dalam daftar gaji pemohon, anak-anak tersebut dapat mendapatkan bantuan dari perusahaan tempat bekerja Pemohon berkaitan dengan perawatan kesehatan di rumah sakit;
  - Bahwa ketika pemohon hendak memasukkan nama anak-anak tersebut ke dalam daftar gajinya, perusahaan meminta pemohon untuk melampirkan penetapan pengadilan;
2. Saksi Maya Sari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permohonan pemohon untuk memasukkan Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah ke dalam Tanggungan Gaji Pemohon;
  - Bahwa Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah merupakan anak dari istri Pemohon dan mantan suaminya;
  - Bahwa Muhammad Hafidz Alfurqon adalah anak dari Andi Meghasatri Dwiansmawanty dengan suami pertamanya yakni Syamsul Bachri Haeruddin sedangkan Zulaykha As Syahidah adalah anak dari Andi Meghasatri Dwiansmawanty dengan suami keduanya Aswar Ashari;
  - Bahwa Andi Meghasatri Dwiansmawanty bercerai dengan Syamsul Bachri Haeruddin pada tanggal 13 januari 2015 sedangkan pada perkawinan kedua Andi Meghasatri Dwiansmawanty dengan Aswar Ashari juga telah putus karena perceraian;
  - Bahwa saat ini Andi Meghasatri Dwiansmawanty telah menikah dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon, anak-anak Andi Meghasatri Dwiansmawanty dengan suami sebelumnya, tinggal dan dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dari anak-anak Andi Meghasatri Dwiansmawanty tidak memberikan nafkah semenjak Andi Meghasatri Dwiansmawanty menikah dengan Pemohon;
- Bahwa alasan kenapa Pemohon ingin memasukkan Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah kedalam daftar gajinya dikarenakan saat ini Muhammad Hafidz Alfurqon sedang menderita penyakit kelainan pada alat kelaminnya sehingga membutuhkan biaya perawatan di rumah sakit sedangkan Zulaykha As Syahidah yang masih balita juga sering sakit-sakitan sehingga membutuhkan perawatan di rumah sakit, maka dengan dimasukkan ke dalam daftar gaji pemohon, anak-anak tersebut dapat mendapatkan bantuan dari perusahaan tempat bekerja Pemohon berkaitan dengan perawatan kesehatan di rumah sakit;
- Bahwa ketika pemohon hendak memasukkan nama anak-anak tersebut ke dalam daftar gajinya, perusahaan meminta pemohon untuk melampirkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memasukkan anak bawaan dari perkawinan sebelumnya dari Istri Pemohon yang bernama Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah kedalam daftar gaji dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 serta mengajukan 2 orang saksi atas nama Anna Safitri dan Maya Sari;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon adalah permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan (buku II) edisi 2007, dimana suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Permohonan yang diajukan menyangkut tentang penetapan suatu kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan yang diajukan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimana status ahli waris diajukan dalam bentuk gugatan;
3. Permohonan yang diajukan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, dimana menyatakan akta atau dokumen diajukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Permohonan pemohon yang pada dasarnya memohon untuk memsukkan anak bawaan istri pemohon dari perkawinan sebelumnya yang bernama Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah kedalam daftar gaji Pemohon, bukanlah suatu permohonan yang dilarang sehingga selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi serta dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Andi Meghasatri Dwiansmawanty telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 maret 2022, sebagaimana telah tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/002/111/2022 dan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (*vide* Bukti P-3). Sebelum pernikahan tersebut, Istri Pemohon yang bernama Andi Meghasatri Dwiansmawanty telah menikah sebanyak 2 kali yakni pertama dengan seorang laki-laki yang bernama Syamsul Bachri Haeruddin dan kedua Aswar Ashari, yang kemudian perkawinan tersebut putus karena perceraian sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Nomor 725/Pdt.G/2014/PA.Sgm dan 2361/Pdt.G/2021/PA.Mks (*vide* Bukti P-7 dan P-8). Dalam perkawinan sebelumnya, Andi Meghasatri Dwiansmawanty dan Syamsul Bachri Haeruddin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Almevira Mustika Kezya Dasya yang lahir pada 9 Mei 2007, Muhammad lyad Alfaruq yang Lahir pada 20 April 2010 dan Muhammad Hafidz Alfurqon yang lahir pada tanggal 2 February 2012 (*vide* Bukti P-4), sedangkan dalam perkawinan keduanya dengan Aswar Ashari, Andi Meghasatri Dwiansmawanty memiliki 1 (satu) orang anak bernama Zulaykha As Syahidah yang lahir pada tanggal 12 Juli 2018 (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Andi Meghasatri Dwiansmawanty menikah, anak-anak Andi Meghasatri Dwiansmawanty dari perkawinan sebelumnya, ikut tinggal bersama Andi Meghasatri Dwiansmawanty dan Pemohon, dimana selama anak-anak tersebut tinggal dengan Pemohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selalu merawat dan memberikan nafkah selayaknya anak kandung dari Pemohon dengan baik dan penuh tanggung jawab, bahwa saat ini Muhammad Hafidz Alfurqon menderita penyakit kelainan pada alat kelaminnya sehingga untuk pengobatannya membutuhkan biaya dan akses ke rumah sakit, sedangkan Zulaykha As Syahidah yang saat ini masih balita sering sakit-sakitan sehingga juga membutuhkan pengobatan, maka untuk mempermudah anak-anak tersebut mendapatkan pengobatan, Pemohon berkeinginan untuk memasukkan Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah kedalam tanggungan anak dalam daftar gaji milik Pemohon di tempat Pemohon bekerja (*vide* Bukti P-1 dan P-2). Namun untuk mengajukan Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah kedalam daftar gaji pemohon, diharuskan untuk dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan mengenai Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah yang benar dalam tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka melihat hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang saat ini telah menjadi suami dari ibu kandung Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah juga berkewajiban untuk memberikan penjaminan dan perlindungan terhadap keberlangsungan anak terkait kebutuhan jasmani maupun rohani si anak. Maka dalam hal permohonan Pemohon yang merupakan niat baik Pemohon untuk menjamin keberlangsungan penghidupan serta pengobatan terhadap Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah tersebut adalah telah sesuai dengan semangat yang dijunjung oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon, apalagi permohonan ini tidak memutuskan tanggung jawab antara orang tua kandung terhadap anak kandungnya dan semata-mata memberikan jaminan perlindungan kepada anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Hakim, permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN MII





Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, bagi pihak yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara, namun dikarenakan dalam gugatan *voluntair* atau permohonan tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Hafidz Alfurqon dan Zulaykha As Syahidah adalah anak yang terlahir dari perkawinan sebelumnya;
3. Menyatakan bahwa Andi Meghasatri Dwiansmawanty telah melangsungkan perkawinan kembali dengan Tajerianto (Pemohon) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor' 0047/002/III/2022 tanggal 04 maret 2022 bertepatan 30 rajab 1443 H;
4. Menyatakan akibat dari perkawinan tersebut anak yang lahir dari perkawinan Andi Meghasatri Dwi Ansmawanty Dengan suami sebelumnya, juga terikat hubungan perkawinan/ keluarga dengan pemohon dan berhak mendapatkan perlindungan layaknya seperti anak dari pemohon;
5. Menyatakan Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yaitu Andi Meghasatri Dwiansmawanty Dan anak dari istrinya tersebut yaitu Muhammad Hafidz Alfurqon Dan Zulaykha As Syahidah, dan memasukkan ke dalam daftar gaji/tanggungan pemohon di tempat pemohon bekerja;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh Satrio Pradana Devanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Burhan,S.H.I. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi  
Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Andi Burhan, S.H.I.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	:	Rp	30.000,-
2. Materai .....	:	Rp	10.000,-
3. Redaksi .....	:	Rp	10.000,-
4. Biaya sumpah .....	:	Rp	25.000,-
5. Pemberkasan Atk .....	:	Rp	100.000,-
Jumlah	:		Rp175.000,00;

( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah )